



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1

F. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Fasilitas Iradiator Kategori I		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	Menggunakan Sumber Radio-aktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Sertifikat Pemanuhan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk	Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusa-haan - Sertifikat Pemenuhan Komit-men Variasi Promosi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian produk		berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan			Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
2	10215	Industri Peragian /Fermen-tasi Ikan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Per-timbang-an Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangku- tan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim	Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerap- an Program Manaje- men Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelaya- kan	lintas antar Provinsi	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									plementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pengola- han - Sertifikat Pemenu- han Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Persetu- juan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusa- haan - Sertifikat Pemenu- han		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan	Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control			UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
3	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical	hamparan lintas antar Provinsi	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Control Point - Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamalamanya 6 (enam) bulan ke depan. 2. Memiliki dokumen berupa: a. spesifikasi mesin dan/atau		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. foto mesin/ peralatan c. perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan,			an Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
4	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and</i>	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	<i>Critical Control Point</i> - Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pemangkit Radiasi		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	Pengion sebagai Penunjang	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Kegiatan Utama - Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	- Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen			- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
5	10221	Industri Pengolahan dan	Seluruh	- Kecil	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng		- Mene-ngh		NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Persetu-juan Penilaian TKDN Penggu-naan Mesin Produksi	Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	 Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Pengua- saan (kepemi- likan/ sewa) mesin untuk mengha-		dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	Dalam Negeri - Sertifikat Penera- pan Program Mana- jemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelaya- kan Pengola- han - Sertifikat Pemenu- han Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/<i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses			Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangku-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
6	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/		sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelayakan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pengola- han - Sertifikat Pemenu- han Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Persetu- juan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusa- haan - Sertifikat Pemenu- han		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i>			Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpa-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangku- tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
7	10295	Industri Peragian /Fermentasi Biota	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Air Lainnya							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	Dalam Negeri - Sertifikat Penera- pan Program Manaje- men Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelaya- kan Pengola- han - Sertifikat Pemenu- han Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusa-haan - Sertifikat Pemenuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manaje-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen			men Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
8	10296	Industri Berbasis Lumatan	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Biota Air Lainnya							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Perimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	Dalam Negeri - Sertifikat Pe- nerapan Program Manaje- men Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelayak- an Pe- ngolahan - Sertifikat Pe- menuhan Komit- men		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pe-menuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamalamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
9	10298	Industri Pengolahan	Pengolahan rumput laut menjadi	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Rumput Laut	olahan lainnya						tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.68

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	Dalam Negeri - Sertifikat Penerap- an Program Manaje- men Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Ke- layakan Peng- olahan - Sertifikat Pe- menuhan Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pe-menuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang	.	produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manaje-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi			men Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
10	10299	Industri Pengolahan dan	Seluruh	- Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya		- Mene- ngah		NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	nen Dalam Negeri - Per- timbang- an Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Per- setujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin	Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Sertifikat Pemenuhan Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pe-menuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
11	10311	Industri Pengasi- nan	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pe-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	menuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifika- si Pe- menuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pe- menuhan Komit- men Produksi Pangan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Yang Baik Pangan Segar Asal Tum- buhan (SPPB- PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT- PD) - Registrasi PSAT Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.87

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
12	10312	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan	satu hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.89

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	- Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi Pangan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.90

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		Produksi Pangan Olahan yang Baik 2. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 3. Menjamin keamanan dan keselamatan	Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemanfaatan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control			Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pene-rapan Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.94

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
13	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Laik Operasi Peng-usahaan Panas Bumi untuk Pe-manfaat-an Langsung	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-	nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.98

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri		plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi	Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.99

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi,		Pangan Olahan yang Baik	Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha			Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
14	10314	Industri Pembe- kuan Buah- buahan dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penuhan Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	- Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerimaan Penanganan Yang Baik Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.106

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.107

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku. b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i>			Kecil (PSAT-PDUK)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.108

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
15	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.109

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dalam Kaleng							perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penuh Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.110

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.111

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	Pangan Olahan - Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan. 1) Pengua- saan (kepemi- likan/ sewa)		perundang- undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan	- Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelaks- anaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.113

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasil- kan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.115

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
16	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.116

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label,	Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.117

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.118

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan,	Pangan Olahan - Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.119

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-	- Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.120

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Mana- jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelak- sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.121

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
17	10391	Industri Tempe Kedelai	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.123

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.124

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.125

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Olahan yang Baik 1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.127

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
18	10392	Industri Tahu Kedelai	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.128

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) - Sertifikat Peme-	Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.129

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi		
				Besar			-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.130

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar			wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan	berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.131

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.132

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
19	10393	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.133

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dan Tempe							dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Pene- litian Dan Pengem- bangan - Surat Per- setujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Per- setujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.134

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Penerimaan Komitmen		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.135

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan	Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.136

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.137

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.138

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.139

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
20	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kacang- Kaca- ngan							bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Perse- tujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifika- si Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Peme-	lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.141

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	nuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan Komitmen Variasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.142

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan	Promosi Pangan Olahan - Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.143

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.144

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.145

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.146

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
21	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.147

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men	lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.148

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control			- Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			- Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.151

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Program Manajemen Risiko (PMR)		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
							2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.153

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.154

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.155

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
22	10412	Industri Margarine	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Per- setujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.157

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk mengha-		dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.158

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.159

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses			UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.160

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.161

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamalamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.162

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.163

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.164

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.165

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
23	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.166

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.167

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaannya - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Penerimaan Komitmen Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.168

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.169

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksana Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.171

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.172

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
24	10414	Industri Minyak Ikan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.173

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point	hamparan lintas antar Provinsi	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.174

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Ke- layakan Peng- olahan - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Per- setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.175

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	- Sertifikat Penuh-nuhan Komite Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap	hamparan lintas antar Provinsi	

SK No 153570 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.176

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.177

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control		Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.178

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.179

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
25	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.180

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.181

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaannya - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.182

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.183

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.184

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksana Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.185

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.186

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
26	10421	Industri Kopra	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.187

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.188

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaannya - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.189

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan		hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.190

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.191

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik			
27	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Pene- litian Dan Pengem- bangan - Surat Per- setujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.192

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.193

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Akun Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika- si Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang- undangan di		Lokasi industri berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industri berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.194

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	- Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen	lintas antar Provinsi	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.195

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksanaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.196

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan			Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.197

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangku- tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.198

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
28	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.199

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.200

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,		1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.201

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang- undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan	- Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.202

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.203

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi,		Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.204

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.205

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
29	10424	Industri Pelet Kelapa	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.206

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Pencelitan Dan Pengembangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.207

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penerimaan Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerimaan Cara Produksi		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.208

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko	Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.209

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	(PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.210

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.211

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.212

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
30	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Seluruh	- Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen: a. legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa: 1) Sertifikat Hak Milik atau	7 Hari	1. Menyampaikan laporan tahap pembangunan, atau tahap produksi jika telah berproduksi, secara akurat, lengkap dan tepat waktu setiap	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.213

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) legalitas pemanfaatan kebun buah kelapa sawit dengan masa penguasaan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifikat Hak Guna Usaha ii. Sertifikat Hak		semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifika-si Nomor Kontrol Veteriner - Izin Pene-rapan Cara	Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.214

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pakai atau iii.Sertifikasi Hak Pengelolaan, yang membuktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesuaian		bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip ketertelusuran dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang-undangan	Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.215

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							luas lahan kebun dengan kemampuan pemenuhan minimal 20 (dua puluh) persen kebutuhan bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan buah			Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.216

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusa- haan perkebu- nan 3) Badan usaha tani (operasi,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.217

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) perusa- haan perdagan gan besar hasil pertanian yang membuk- tikan adanya kontinui- tas dan jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.218

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sawit dari sumber yang sah. 2. Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutu- han bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.219

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutu- han energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.220

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama- lamanya 6 (enam) bulan ke depan. b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun:					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.221

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.222

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan. 3. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemili-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.223

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri turunan kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk					
				- Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen: a. Legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa:	7 Hari	1. Menyampaika n laporan tahap pembangunan , atau tahap produksi jika telah berproduksi, secara akurat,		Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.224

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Sertifikat Hak Milik atau 2) Legalitas pemanfaatan kebun buah kelapa sawit dengan masa penguasaan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifikat Hak Guna Usaha		lengkap dan tepat waktu setiap semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen		Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.225

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Sertifikat Hak Pakai atau iii. Sertifikat Hak Pengelolaan, yang membuktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesu-		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.226

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							aian luas lahan kebun dengan kemam- puan peme- nuhan minimal 20 (dua puluh) persen kebutu- han bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan		ketertelusura n dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang- undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.227

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusa- haan perkebu- nan 3) Badan usaha tani					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.228

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) Perusa- haan perdaga- ngan besar hasil pertanian yang membuk- tikan adanya kontinui- tas dan jaminan pasokan bahan baku berupa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.229

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buah kelapa sawit dari sumber yang sah. 2. Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutu- han bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.230

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.231

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan. b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/ buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.232

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) tahun: 1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1					.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.233

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan. 3. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.234

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri turunan kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.235

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi dan/atau <i>quality control</i> c. Penang-gungjawab bagian pemasaran d. Penang-gungjawab bagian keuangan e. Penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM 5. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.236

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.237

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses dan membuktikan tersedianya a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) /atau b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.238

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menetralisir limbah cair dari hasil sisa kegiatan produksi.					
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen: a. Legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa: 1) Sertifikat Hak Milik atau 2) Legalitas pemanfaatan kebun buah kelapa sawit	7 Hari	1. Menyampaikan laporan tahap produksi secara akurat, lengkap dan tepat waktu, setiap Semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.239

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan masa pengua- saan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifi- kat Hak Guna Usaha ii. Sertifi- kat Hak Pakai atau iii. Sertifi- kat Hak Pengelo- laan, yang membu-		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – <i>Certificate of Analysis</i>) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselama-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.240

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesuaian luas lahan kebun dengan kemampuan pemenuhan minimal		tan (SDS – Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.241

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							20 (dua puluh) persen kebutuhan bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/ peralatan quality control secara periodik 7. Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.242

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusahaan perkebunan 3) Badan usaha tani (koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) Perusahaan perdagangan		bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip ketertelusuran dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang-undangan 8. Memiliki dokumen yang terpelihara dan diperbaharui secara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.243

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan besar hasil pertanian yang membuk- tikan adanya kontinui- tas dan jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah. 2. Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan		periodik mengenai spesifikasi teknis produk akhir dan/atau produk samping yang dihasilkan sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.244

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutuhan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.245

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.246

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/ buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun: 1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.247

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) bulan ke depan.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.248

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri turunan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.249

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau <i>quality control</i> c. Penang-gungjawab bagian pemasaran					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.250

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penang- gungjawab bagian keuangan e. Penang- gungjawab bagian pengem- bangan SDM 5. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa- nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengema- san,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.251

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.252

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<i>layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) /atau b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.253

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menampung dan menetralsir limbah cair dari hasil sisa kegiatan produksi.					
31	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.254

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.255

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		
				- Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.256

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan	Pangan Olahan	Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.257

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.258

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.259

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/<i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.260

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
32	10433	Industri Pemisa- han/ Fraksi- nasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.261

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Inti Kelapa Sawit					energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan	Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.262

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.263

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyi-mpa-			Produksi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.264

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangku- tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.265

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah / besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.266

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.267

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.268

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.269

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
33	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.270

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.271

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	- Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.272

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.273

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.274

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.275

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.276

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
34	10435	Industri Pemisa-	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifikat Tingkat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.278

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.279

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.280

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.281

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.282

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.283

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan</i> <i>layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.284

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35	10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.285

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.286

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.287

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.288

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.289

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.290

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.291

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.292

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerimaan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.293

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.294

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur			Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.295

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.296

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.297

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.298

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa- nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.299

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.300

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
37	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom--ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.301

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.302

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Penerimaan Komite Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.303

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.304

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persebaran Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.305

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control		Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.306

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.307

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
38	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.308

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.309

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.310

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen			Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Mana-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.311

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.312

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan		Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.313

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.314

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.315

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.316

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
39	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.317

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifika-si Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Peme-nuhan	Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.318

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.319

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan			Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.320

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangku- tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi			- Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelak- sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.321

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.322

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.323

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan / sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.324

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.325

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
40	10531	Industri Pengola-	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.326

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		han Es Krim							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.327

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Dalam Negeri - Sertifika- si Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.328

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.329

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	(PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.330

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan / sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.331

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.332

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
41	10532	Industri Pengolahan Es	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kom-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.333

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sejenis-nya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)		- Mene- ngah					Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Per- setujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin Produksi	Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.334

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.335

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.336

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	(PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.337

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.338

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.339

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.340

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
42	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perseujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.341

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.342

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.343

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.344

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.345

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.346

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.347

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
43	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.348

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.349

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifika- si Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit-	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.350

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.351

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.352

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			- Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.353

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan			(PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.354

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
44	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.355

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	nuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Penuhan Komitmen Produksi	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.356

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang- undangan di	- Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK	Lokasi industri berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industri berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.357

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerimaan Pe-	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.358

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.359

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan			Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.360

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangku- tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk			Pengem- bangan - Surat Per- setujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.361

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
45	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.362

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.363

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaannya - Sertifikat Penuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.364

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.365

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.366

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i>		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pene-rapan Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.367

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.368

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
46	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.369

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.370

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.371

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.372

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perseujuan Penilaian TKDN Peng-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.373

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i>		Olahan yang Baik	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.374

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.375

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
47	10615	Industri Makanan Sereal	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.376

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.377

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaannya - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikasi Penerimaan Komitmen Produksi Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.378

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamany 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.379

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.380

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i>		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.381

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.382

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
48	10616	Industri Tepung Terigu	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.383

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamalamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.384

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.385

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen			yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.386

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.387

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.388

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.389

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.390

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.391

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
49	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.392

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan	Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.393

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.394

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan	nuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.395

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.396

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelak- sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.397

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.398

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
50	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.399

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men	lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.400

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.401

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikasi Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.402

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	- Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.403

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Mana- jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelak- sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.404

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.405

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
51	10623	Industri Glukosa dan Sejenis-nya	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.406

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.407

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.408

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i>		Olahan yang Baik	- Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.409

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.410

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.411

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.412

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.413

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.414

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
52	10629	Industri Pati dan Produk	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.415

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pati Lainnya							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.416

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Dalam Negeri - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.417

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Penuhan Komitmen Produksi Pangan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.418

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.419

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.420

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.421

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
53	10633	Industri Tepung Beras	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kom-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.422

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Tepung Jagung		- Mene- ngah					Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Perse- tujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin	Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.423

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.424

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika- si Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit- men Produksi		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.425

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.426

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerimaan Pe-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.427

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.428

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.429

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
54	10634	Industri Pati Beras dan Jagung	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.430

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerimaan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.431

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
										- Izin Peme-nuhan Komit-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.432

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.433

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.434

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			- Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.435

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan			(PSAT- PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.436

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
55	10635	Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Perse- tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.437

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.438

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Akun Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene- rapan Program		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.439

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak			Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.440

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.441

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.442

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri		plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.443

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku,		prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.444

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.445

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
56	10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.446

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.447

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerimaan Cara Produksi		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.448

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko	Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.449

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	(PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.450

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.451

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/<i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.452

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
57	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.453

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Penuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan	Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.454

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.455

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.456

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifika-si Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.457

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.458

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.459

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
58	10721	Industri Gula Pasir	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.460

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.461

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.462

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i>		Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.463

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.464

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki dokumen bukti kepemilikan atau hak penggunaan/ pemanfaatan tanah, berupa: a. Sertifikat Hak Milik b. Sertifikat Hak Pakai c. Sertifikat Hak Pengelolaan atau d. Akta Notaris Pelepasan Hak atas tanah, yang membuktikan-					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.465

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan penguasaan lahan perkebunan dengan luasan minimal sesuai peraturan perundang- undangan 6. Memiliki dokumen perjanjian kemitraan berupa suplai bahan baku hasil perkebunan dengan pelaku usahan sektor perkebunan yang membuktikan jaminan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.466

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketersediaan bahan baku hasil perkebunan dalam negeri.					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.467

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan		produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.468

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data		Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.469

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.470

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki dokumen bukti kepemilikan atau hak penggunaan/					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.471

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemanfaatan tanah, berupa: a. Sertifikat Hak Milik b. Sertifikat Hak Pakai c. Sertifikat Hak Pengelolaan atau d. Akta Notaris Pelepasan Hak atas tanah, yang membuktikan penguasaan lahan perkebunan dengan luasan minimal sesuai peraturan					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.472

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan 6. Memiliki dokumen perjanjian kemitraan berupa suplai bahan baku hasil perkebunan dengan pelaku usaha sektor perkebunan yang membuktikan jaminan ketersediaan bahan baku hasil perkebunan dalam negeri.					
59	10722		Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kom-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.473

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Industri Gula Merah		- Mene- ngah					Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Perse- tujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin	Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.474

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung - Sertifikat Pemanfaatan Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.475

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.476

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.477

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.478

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.479

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.480

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60	10723	Industri Sirup	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Perse- tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.481

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Pengua- saan (kepemi- likan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.482

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika- si Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.483

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur			men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.484

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR)		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.485

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.486

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.487

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyi-mpa-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.488

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangku- tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.489

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
61	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.490

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.491

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaannya - Sertifikat Penuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.492

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang- undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.493

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.494

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi,		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.495

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.496

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
62	10731	Industri Kakao	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.497

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.498

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.499

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.500

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.501

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.502

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.503

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.504

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.505

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
63	10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pem-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.506

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label,	bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifika-si Nomor Kontrol Veteriner	hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.507

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Per- setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.508

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik	Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikasi Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.509

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.510

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan / sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.511

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.512

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
64	10733	Industri Manisan Buah-buahan dan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.513

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sayuran Kering							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-	- Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.514

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	- Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.515

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.516

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamalamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik		penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.517

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.518

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi			Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.519

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
65	10734		Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifikat Tingkat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.520

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Industri Kembang Gula		- Mene- ngah					wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Per- setujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin	berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.521

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.522

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifika- si Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.523

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	nuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.524

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.525

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.526

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan</i> <i>layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.527

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
66	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.528

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemanuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.529

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.530

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	Tangga (SPP-IRT) - Izin Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.531

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.532

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.533

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.534

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
67	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perseujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.535

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Penerimaan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perseujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.536

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.537

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	Tangga (SPP-IRT) - Izin Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.538

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.539

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.540

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.541

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
68	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Perse- tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.542

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerimaan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Ke-layakan Peng-olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.543

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.544

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.545

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.546

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			- Izin Pene-tapan Industri Per-tahanan - Sertifikat Per-setujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Per-tahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.547

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Per-tahanan dan Ke-amanan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.548

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
69	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.549

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung - Sertifikat Pemenuhan Komitmen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.550

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.551

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	- Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.552

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerimaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.553

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.554

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.555

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
70	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.556

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerimaan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.557

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Akun Perusahaan - Sertifikat Penuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.558

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.559

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.560

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa- nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpa-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.561

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangku- tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.562

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
71	10763	Industri Pengolahan Teh	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.563

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Laik Operasi Peng-usahaan Panas Bumi untuk Peman-	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.564

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	faatan Langsung - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Penuhan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.565

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang- undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan pengemasan	Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK	hamparan lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.566

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.567

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i>		Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.568

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.569

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki dokumen bukti kepemilikan atau hak penggunaan/ pemanfaatan tanah, berupa: a) Sertifikat Hak Milik b) Sertifikat Hak Pakai c) Sertifikat Hak Pengelolaan atau d) Akta Notaris Pelepasan Hak atas					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.570

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanah, yang membukti- kan penguasaan lahan perkebunan dengan luasan minimal sesuai peraturan perundang- undangan 6. Memiliki dokumen perjanjian kemitraan berupa suplai bahan baku hasil perkebunan dengan pelaku usahan sektor perkebunan yang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.571

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan jaminan ketersediaan bahan baku hasil perkebunan dalam negeri.					
72	10771	Industri Kecap	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.572

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.573

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Penerimaan Komit-		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.574

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan	Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.575

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.576

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.577

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.578

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
73	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.579

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifika-si Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Peme-nuhan	Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.580

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.581

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan	Pangan Olahan - Sertifikasi Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Penuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.582

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.583

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pene-rapan Pe-nanganan Yang Baik Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.584

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i>			Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.585

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
74	10773	Industri Produk Masak dari Kelapa	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.586

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.587

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.588

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik	Olahan yang Baik (CPPOB)		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.589

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Pengua- saan		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelak- sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Tingkat Kompo- nen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.590

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemi- likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Perse- tujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.591

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.592

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
75	10774	Industri Pengolahan Garam	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.593

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perseujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.594

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.595

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.596

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.597

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
76	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Izin Pene-tapan Industri Per-tahanan - Sertifikat Perse-tujuan Kelaikan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.598

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Fasilitas Produksi Per-tahanan (Certificate of Approval Facility Worth-iness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Per-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	
												Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.599

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	tahanan dan Keamanan - Sertifikat Penerimaan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.600

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik	- Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifika- si Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit-	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.601

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.602

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelak- sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.603

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan			- Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Ke-layakan Peng-olahan - Sertifika-si Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Tingkat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.604

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.605

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Produksi Dalam Negeri		
77	10791	Industri Makanan Bayi	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Perse- tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.606

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.607

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemi- likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan Izin Pene- rapan Cara - Produksi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.608

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak			yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.609

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelak- sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.610

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.611

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri		plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.612

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi,		prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.613

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.614

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
78	10792	Industri Kue Basah	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.615

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.616

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerimaan Cara Produksi		
				- Besar	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.617

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko	Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.618

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	(PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.619

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
79	10793	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.620

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.621

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaannya - Sertifikat Penerimaan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Penerimaan Komitmen		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.622

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan	Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.623

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan	Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.624

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.625

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/<i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.626

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
80	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenis-nya	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.627

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pene-rapan Program Mana-jemen Mutu	Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.628

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Ke-layakan Peng-olahan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

I.F.629

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifi-kasi Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.630

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme- nuhan Komit- men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.631

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.632

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i>			Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelak- sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.633

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
81	10795	Industri Krimer Nabati	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam	Bupati/ Walikota Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.634

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.635

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.636

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	Olahan yang Baik 1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.637

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Pengua- saan		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse- tujuan Pelak- sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.638

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemi- likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.639

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.640

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
82	10796	Industri Dodol	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.641

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perseujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.642

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	- Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusaha- an - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.643

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikasi Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.644

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.645

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.646

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.647

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
83	10799	Industri Produk	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifikat Tingkat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.648

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Makanan Lainnya		- Mene- ngah					wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis Pem- bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem- bangan - Surat Perse- tujuan Penilaian TKDN Peng- gunaan Mesin	berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Gubernur Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.649

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Izin Edar Suplemen Kesehatan - Sertifikat Penuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.650

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Perse-tujuan Mem-produksi Suplemen Kesehat-an di	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.651

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	Fasilitas Pangan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.652

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Pratinik Suplemen Kesehatan - Perse-tujuan Pelak-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.653

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			sanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Hasil Uji Prakinik Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.654

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			- Perse- tujuan Iklan Suplemen Kesehatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.655

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
84	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Cara Pem- buatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) - Sertifikat Pen- daftaran Pakan Ikan - Pen- daftaran Pakan - Registrasi Produk Hewan - Sertifikat Cara Pem- buatan Pakan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.656

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	yang Baik (CPPB) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.657

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.658

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.659

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.660

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.661

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.662

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
85	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.663

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pakan - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.664

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang- undangan di		Lokasi industri berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industri berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.665

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		lintas antar Provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.666

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti- kan: 1) Pengua- saan (kepemi- likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim- plementasi- kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.667

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpa-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.668

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangku- tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.669

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
86	11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	pangan olahan yang diproduksi 1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse- tujuan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.670

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari KeMenteri/ Kepala badan yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.671

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		undangan mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama perusahaa n, kepemilika natau penanggun g jawab Perusahaa n Industri Minuman Beralkohol	Akun Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene- rapan Program Mana- jemen		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.672

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan		b.Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d.Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha).	Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.673

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol			sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.674

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang masih berlaku.					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.675

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari Kementerian yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.676

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama perusahaa n, kepemilika natau penanggun g jawab Perusahaa n Industri Minuman Beralkohol			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.677

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan		b.Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d.Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha) 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.678

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol		kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 5. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.679

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang masih berlaku 6. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengembangan SDM, penanggung-jawab bagian <i>quality control</i> 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas		Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.680

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang <i>quality control</i> 8. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.681

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
87	11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.682

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti- kan: 1) Pengua- saan (kepemi- likan/ sewa) mesin		perundang- undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari Kementerian yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang- undangan mengenai pengendalian dan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.683

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu- aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama perusahaan, kepemilika natau penanggun g jawab Perusahaa n Industri Minuman Beralkohol b. Perubahan alamat pabrik	- Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene- rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene- rapan Program Mana- jemen Risiko (PMR) Bertahap		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.684

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur		c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d. Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha)	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerimaan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.685

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	6. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol yang masih berlaku. 1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.686

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.687

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Pengua- saan (kepemi- likan/ sewa) mesin untuk mengha-		persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari Kementerian yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.688

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama perusahaan, kepemilikan atau penanggung jawab Perusahaan Industri Minuman Beralkohol b. Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.689

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/<i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses		d. Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha) 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.690

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol yang masih berlaku 6. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari		penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 5. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.691

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pimpinan perusahaan, penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengembangan SDM, penanggung-jawab bagian <i>quality control</i> 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.692

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang <i>quality control</i> 8. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja.					
88	11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	Seluruh	- Kecil - Mene- ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom- ponen Dalam Negeri - Pertim- bangan Teknis	Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.693

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah / besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol	Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.694

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Pengua- saan (kepemi- likan/ sewa) mesin untuk mengha- silkan produk industri makanan dan minuman		dari Kementerian yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi:	men Pangan Olahan - Sertifikat Perse- tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per- usahaan - Sertifikat Peme- nuhan Komit- men Variasi Promosi Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.695

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i>		a. Perubahan nama perusahaan, kepemilikan atau penanggung jawab Perusahaan Industri Minuman Beralkohol b. Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d. Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi	- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.696

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ <i>plan layout facilities</i> sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar		satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha).	Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.697

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol yang masih berlaku					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.698

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama- lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng- angkutan, sesuai peraturan perundang- undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari Kementerian			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.699

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.700

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses <i>quality control</i> d. Pengemasan, penyimpa-		perusahaan , kepemilika natau penanggungan jawab Perusahaan Industri Minuman Beralkohol b.Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d.Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau			